

Penerapan *Good School Governance (GSG)* Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar

Hendri Susanti

Dinas Pendidikan Kota Blitar

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of good school governance on the effectiveness of the management of elementary school operational assistance. The method used is descriptive analysis method with a quantitative approach. The sample used saturated samples by showing all treasurers of primary school operational assistance as many as 48 people, data collected by questionnaire techniques while data analysis used multiple linear regression techniques. The results showed that participation had a positive and significant effect on the effectiveness of the management of school operational assistance, transparency had a positive and significant effect on the effectiveness of the management of school operational assistance, while accountability separately did not have a positive and significant effect on the effectiveness of the management of school operational assistance but together participation, transparency and accountability have a positive and significant effect on the effectiveness of managing school operational assistance.

Keywords: good school governance, effectiveness, and school operational assistance

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan konskuensi logis dari implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar minimal ini merupakan tanggung jawab negara baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Signifikansi peran bantuan operasional sekolah tersebut, Dewi (2015) menjelaskan bahwa bantuan operasional sekolah berperan signifikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun dengan indikator pencapaian angka partisipasi kasar (APK) SD dan SMP. Dengan dilaksanakannya program bantuan ini APK SD mencapai 115% pada tahun 2005 dan APK SMP mencapai 98,11 % pada tahun 2009, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education for All (EFA) di Dakar.

Arti penting tersebut mengharuskan pengelolaan dana bos yang efektif dan bertanggung jawab. Indawati, dkk (2017) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan sekolah yang memperhatikan regulasi dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan efisien akan menciptakan Suasana

sekolah yang kondusif bagi peningkatan kinerja dan kualitas sekolah. Selain itu, dapat berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin dengan mempertimbangkan perlindungan keamanan dan kesejahteraan anak, serta memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus.

Berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Dalam tataran teknis, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Non Personalia. Kaitan dengan iuran wali murid, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Khusus mengenai pengelolaan bantuan operasional sekolah, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri setiap tahun, terakhir, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Dalam peraturan ini setiap sekolah mendapatkan bantuan operasional berdasarkan jumlah murid sebesar Rp. 800.000,00 perpeserta didik pertahun untuk jenjang sekolah dasar dan sebesar Rp. 1.000.000,00 perpeserta didik pertahun untuk jenjang sekolah menengah pertama.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Subbag Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Blitar, masih nampak adanya ketidakefektifan dalam proses pengelolaan bantuan operasional sekolah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Hal ini ditunjukkan dengan didapatnya data bahwa pada akhir tahun 2016 realisasi dana bos untuk jenjang sekolah dasar memiliki sisa dana tidak terealisasi sebesar Rp. 130.490.989,00 dan pada akhir tahun 2017 sisa dana tidak terealisasi meningkat menjadi Rp. 139.469.021,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,88 %. Adapun sisa dana perkecamatan sebagaimana tertera pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar

No	Kec.	Sisa Dana Bos (Rp)	
		2016	2017
1	Kepanjankidul	64.778.334	56.418.250
2	Sananwetan	35.692.199	63.155.314
3	Sukorejo	30.020.456	19.895.457
Jumlah		130.490.989	139.469.021

Sumber: *Subbag Keuangan Diolah*

Dari tabel tersebut akan nampak jelas permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan bantuan operasional sekolah bila ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 1.1
Grafik Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar

Gambaran rekapitulasi sisa dana tersebut akan nampak jelas bahwa sekolah dasar di Kecamatan Sananwetan mengalami kenaikan yang signifikan dibanding dengan kecamatan yang lain bila disampaikan dalam bentuk grafik diatas. Untuk menjamin efektivitas penggunaan dana bos diperlukan manajemen pembiayaan yang tepat. Manajemen pembiayaan pendidikan harus difokuskan pada bagaimana sumber dana yang ada bisa dikelola secara profesional sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Jahari dan Syarbini (2013) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikan fasilitas atau sarana pendukung pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien.

Efektivitas menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Efektivitas merupakan sebuah pencapaian tujuan. Hambalang (2013) menyatakan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih cara yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, efektifitas dapat dijelaskan sebagai menumbuhkan kreatifitas (Danim, 2012). Dalam hal ini, efektifitas dapat diartikan sebagai kreatifitas sekolah dalam memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah.

Pencapaian tujuan sekolah harus didasarkan pada prinsip dan teori manajemen. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah teruang dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Pada dasarnya majemen berbasis sekolah merupakan implementasi dari Good School Governance (GSG) atau Good

Corporate Governance (GCG) yang digunakan untuk instansi pendidikan khususnya sekolah. Good School Governance (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Slamet (2006) menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Dewi (2015) telah membuktikan secara empiris bahwa beberapa kepala sekolah masih kesulitan dalam menyalurkan dana bantuan operasional sekolah. Lebih dalam lagi Elmizola (2015) menemukan bahwa masih adanya pengelolaan bantuan operasional yang tidak efektif disebabkan oleh ketidak sesuaian antara perencanaan dan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh partisipasi sekolah terhadap efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar
2. Pengaruh transparansi terhadap efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar
3. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar
4. Pengaruh secara bersama-sama partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang akan didapatkan berupa angka-angka hasil isian responden terhadap kuisioner yang dibagikan oleh peneliti. Sugiyono (2012:23) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah bila data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh bendahara bantuan operasional sekolah di tingkat satuan pendidikan jenjang sekolah dasar sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang. Semua populasi dijadikan sampel

penelitian sebagaimana dihelaskan oleh Arikunto (2012) yang menyatakan bahwa sampel jumlah populasi yang kurang dari 100 orang tidak perlu dilakukan sampling.

Variabel penelitian meliputi efektifitas pengelolaan bantuan operasional sebagai variabel terikat (Y), dan prinsip-prinsip good school governance sebagai variabel bebas terdiri dari partisipasi (X1), transparansi (X2), dan akuntabilitas (X3).

Umar dan Jhones dalam Mitra (2010) mendefinisikan secara konseptual efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sementara itu, dalam penelitian ini efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah dapat ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Partisipasi diartikan sebagai sebagai proses dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah (Fauzan, 2014).

Transparansi sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi/ ke-terbukaan ini ditunjukkan dalam dimensi *informativness, disclosure* (Mardiasmo, 2006). Adapun akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Handayani (2015).

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan pada setiap kuisioner diberikan skor sesuai dengan skala linkert yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2014:93). Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software spss.

HASIL PENELITIAN
Kualitas Data

Validitas Data Penelitian

Hasil uji validitas variabel penelitian ini tampak pada menunjukkan bahwa seluruh data pada setiap butir dinyatakan valid karena seluruh signifikansi setiap item tersebut memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Validitas Efektivitas

Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation
efktv_1	0,000	0,516
efktv_2	0,000	0,556
efktv_3	0,002	0,437
efktv_4	0,000	0,678
efktv_5	0,000	0,572
efktv_6	0,007	0,381
efktv_7	0,004	0,410
efktv_8	0,000	0,566
efktv_9	0,001	0,454
efktv_10	0,000	0,559

Sumber : *Data diolah, 2018*

Adapun untuk validitas variabel partisipasi (X1) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Validitas Partisipasi

Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation
part_1	0,000	0,727
part_2	0,000	0,696
part_3	0,000	0,718
part_4	0,000	0,747
part_5	0,000	0,640
part_6	0,000	0,650

Sumber : *Data diolah, 2018*

Untuk validitas variabel transparansi (X2) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Validitas Transparansi

Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation
trans_1	0,000	0,608
trans_2	0,001	0,474
trans_3	0,000	0,538
trans_4	0,010	0,370
trans_5	0,000	0,772
trans_6	0,000	0,812
trans_7	0,000	0,788
trans_8	0,000	0,497
trans_9	0,000	0,785

Sumber : *Data diolah, 2018*

Untuk validitas variabel akuntabilitas (X3) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4
Validitas Akuntabilitas

Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation
akntbl_1	0,000	0,608
akntbl_2	0,000	0,739
akntbl_3	0,000	0,511
akntbl_4	0,012	0,359
akntbl_5	0,000	0,766
akntbl_6	0,000	0,485
akntbl_7	0,000	0,547
akntbl_8	0,008	0,380
akntbl_9	0,000	0,552
akntbl_10	0,000	0,577

Sumber : *Data diolah, 2018*

Reliabilitas Data Penelitian

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *Alpha Cronbach*. Jika nilai $\alpha > 0.70$ maka reliabilitasnya mencukupi, sementara jika $\alpha > 0.80$ mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Secara total, data dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien α total sebesar 0,886. Sedangkan secara terpisah antar variabel memiliki hasil uji yang berbeda-beda sebagaimana tabel 4.8 berikut :

Tabel 1.4
Reliabilitas Data

Variabel	Nilai	Tingkat Reliabilitas
Efektivitas	0,879	Kuat
Partisipasi	0,881	Kuat
Transparansi	0,887	Kuat
Akutabilitas	0,880	Kuat

Sumber : *Data diolah, 2018*

Uju Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Dalam melakukan pengujian normalitas data, peneliti menggunakan nilai absolut dari most extreme differences yang pada uji kolomogorov smirnov sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.5
Hasil Uji Kolomogorov Smirnov

Variabel	Absolute Value	Nilai Alpha
Efektivitas	0,173	0,05
Partisipasi	0,195	0,05
Transparansi	0,234	0,05
Akutabilitas	0,210	0,05

Sumber : *Data diolah, 2018*

Uji Linieritas Data

Uji linieritas data dimaksudkan untuk mengetahui linier tidaknya hubungan masing-masing variabel. Uji linieritas data terpenuhi bila Linierity lebih kecil dari 0,05 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Linieritas

Variabel	Linierity Value	Nilai Alpha
Partisipasi	0,000	0,05
Transparansi	0,000	0,05
Akutabilitas	0,001	0,05

Sumber : *Data diolah, 2018*

Uji Multikolinearitas

Untuk melakukan uji ini, peneliti menggunakan nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Nilai Tolerance < 1, dan VIF > 1 dan < 10. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji VIF dan Tolerance

Variabel	Tolerance	VIF
Partisipasi	,827	1,210
Transparansi	,549	1,821
Akutabilitas	,520	1,925

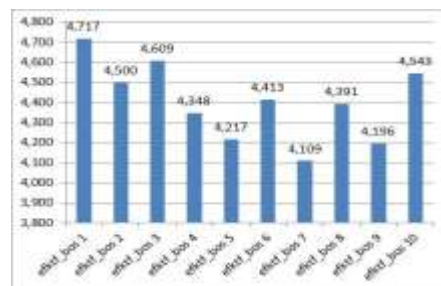
Sumber : *Data diolah, 2018*

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dinyatakan bahwa data yang dianalisa terbebas dari multikol-inieritas, normal dan linier.

Deskripsi Data

Efektivitas

Data menyatakan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar berada pada level sangat efektif dengan ditunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,404. Meskipun secara umum pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar sudah sangat efektif, namun berdasarkan kuisisioner yang dibagikan masih terdapat pada item pertanyaan ke tujuh dan ke sembilan. Nilai rerata untuk pertanyaan sebesar ke tujuh yang berbunyi laporan realisasi kegiatan tepat waktu dan tidak molor, serta sesuai dengan peruntukannya, sedangkan item ke sembilan berbunyi tidak ditemu-kannya markup harga / anggaran dalam laporan realisasi bantuan operasional sekolah masih perlu ditingkatkan. Skor rata-rata untuk item ketujuh dan sembilan sebesar 4,109 dan 4,196. Level skor antara 3,40 – 4,20 yang mengandung pengertian pada level efektif sebagaimana grafik berikut.

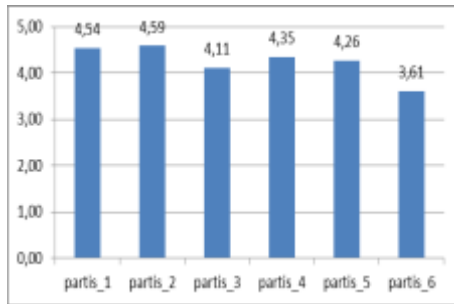


Gambar 1.1
Efektivitas Pengelolaan BOS
Kota Blitar

Partisipasi

Partisipasi berada pada level sangat partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata tanggapan

responden terhadap variabel ini sebesar 4,243 dimana nilai rata-rata ini berada diantara 4,20 – 5,00. Meskipun demikian, data juga menunjukkan adanya beberapa indikator yang berada pada posisi lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan variabel ini. Responden memberikan tanggapan bahwa terkait adanya sumbangan wali murid bila biaya dari bantuan operasional sekolah tidak mencukupi mendapatkan skor rata-rata terendah sebesar 3,609, kemudian disusul tanggapan bahwa sekolah melaksanakan survey/angket kepada pihak-pihak terkait tentang rencana dan program yang akan dituangkan dalam RAPBS mendapatkan nilai rata-rata 4,109. Gambaran secara keseluruhan nilai rata-rata pada variabel ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

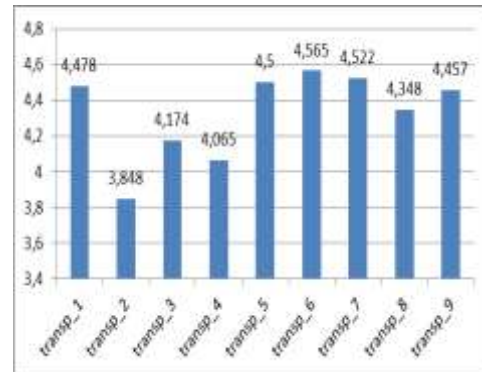


Gambar1.2
Partisipasi Pengelolaan BOS
Kota Blitar

Transparansi

Transparansi berada pada level sangat transparan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel ini sebesar 4,329 dimana nilai rata-rata ini berada diantara 4,20 – 5,00. Meskipun demikian, data juga menunjukkan adanya beberapa indikator yang berada pada posisi lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan variabel ini. Responden memberikan tanggapan bahwa terkait dengan peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa oleh sekolah, kemudahan bagi setiap stakeholder memiliki akses informasi baik orang tua maupun lembaga non pemerintah, penyusunan suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, secara berturut-turut memiliki skor rata-rata sebesar 2.848, 4.174, dan 4.065 Gambaran

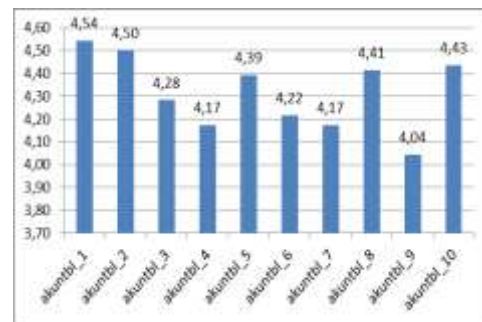
secara keseluruhan nilai rata-rata pada variabel ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar1.3
Transparansi Pengelolaan BOS Kota Blitar
Akuntabilitas

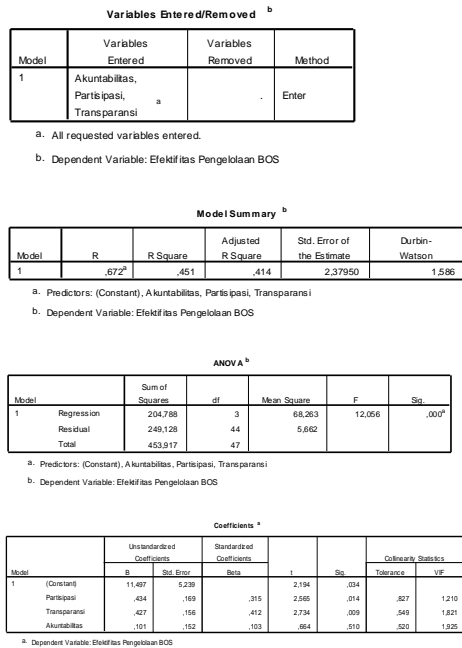
Akuntabilitas berada pada level sangat akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel ini sebesar 4,317 dimana nilai rata-rata ini berada diantara 4,20 – 5,00. Meskipun demikian, data juga menunjukkan adanya beberapa indikator yang berada pada posisi lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan variabel ini.

Responden memberikan tanggapan bahwa terkait dengan pergeseran anggaran atau rubah rincian tidak sering terjadi, pengumuman pelaksanaan anggaran dimuat dalam laman / web sekolah, sekolah tidak melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh bos yang dapat dikategorikan korupsi, kolusi dan nepostime, masing-masing secara berurutan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4.174, 4.174, dan 4.0413. Gambaran nilai rata-rata pada variabel ini digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar1.4
Akuntabilitas Pengelolaan BOS Kota Blitar
Pengujian Regresi Berganda

Tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, hasil regresi dapat dilihat *coefficients*. Variabel bebasnya pada regresi ini adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Output software spss yang dihasilkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.5 Output SPSS Analisis Regresi Pengaruh Good School Governance Terhadap Efektifitas Pengelolaan BOS

Berdasarkan output tersebut didapatkan data nilai F hitung = 12.056, Sig F = 0.000. Selain itu didapat juga nilai R Square sebesar 0.451 dan nilai beta unstandardized untuk konstanta 11.497, koefisien beta variabel partisipasi (X1) 0.434 dengan nilai signifikansi 0.014, variabel transparansi (X2) 0.427 dengan nilai signifikansi 0.009, dan variabel akuntabilitas (X3) 0.101 dengan nilai signifikansi 0,510.

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya terdapat pengaruh partisipasi terhadap efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kota Blitar. Selan itu, hasil perhitungan koefisien regresi untuk variabel partisipasi memiliki nilai yang positif. Fenomena mengandung pengertian bila partisipasi ditingkatkan, maka akan meningkatkan tingkat efektivitas. Demikian pula sebaliknya apabila nilai partisipasi menurun, maka akan menurunkan tingkat efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kota Blitar.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kaiatu (2016) yang menjelaskan bahwa manajemen untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Hal ini mengandung pengertian bahwa untuk mengetahui kebutuhan publik dan stakeholder, pelibatan mereka dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah mutlak diperlukan. Manajemen sekolah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan stakeholder bila tidak menanyakan langsung kepada mereka.

Selain hal tersebut, Slamet (2006) menjelaskan bahwa partisipasi adalah proses dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah.

Secara nyata berdasarkan apa yang disampaikan oleh Adi Tjahjono dalam wawancara melalui telepon menjelaskan bahwa peran komite sekolah sangat menentukan dalam pengelolaan sekolah bahkan untuk melaksanakan evaluasi diri sekolah, manajemen sekolah maupun pemetaan mutu pendidikan memerlukan judgment/penilaian dari mereka juga. Peran komite sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan bos

pada level sangat efektif sehingga mendukung hasil penelitian Bhawa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah berada pada kisaran sangat efektif dengan prosentase indikator perencanaan dengan kriteria sangat efektif (91%), indikator pelaksanaan dengan kriteria sangat efektif (81%), dan indikator pertanggungjawaban dengan kriteria sangat efektif (88%).

Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Wikipedia (2016) menerangkan bahwa transparansi memiliki arti seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Selain itu, Slamet (2006) menjelaskan bahwa transparansi adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi ini ditunjukkan dalam semua kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu meliputi pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya.

Basis teori tersebut memperkuat hasil penelitian/ pengujian terhadap hipotesis ini yang menyatakan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sekaligus interpretasi terhadap koefisien regresi yang menyatakan apabila transparansi ditingkatkan, maka akan meningkatkan tingkat efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar. Demikian pula sebaliknya apabila transparansi menurun, maka akan menurunkan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Fauzan (2014) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Bila dilihat lebih jauh, pada analisa deskriptif ditemukan bahwa umumnya responden berada pada level sangat transparan dan transparan sebagaimana disampaikan oleh Krina P. (2003) yang mendefinisikan transpa-

ransi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah-an, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana pada pengujian ini sebesar t_{hitung} sebesar 0,664. Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} 2,013 ($0,664 < 2,013$)

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,510 lebih besar daripada 0,05, maka, ini menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_a ditolak.

Artinya tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kota Blitar. Namun, nilai yang positif pada koefisien sebesar 0,101 mengandung pengertian apabila akuntabilitas ditingkatkan, maka akan meningkatkan tingkat efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar sebesar 0,101 point. Demikian pula sebaliknya apabila nilai akuntabilitas menurun, maka akan menurunkan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar sebesar 0,101 point.

Hasil penelitian ini mengu-atkan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Fauzan (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar kota blitar. Analisa deskriptif terhadap variabel ini yang menyatakan bahwa keseluruhan bendahara bantuan operasional sekolah dasar dirangkap oleh guru seolah-olah mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Terkait dengan hal ini, disampaikan oleh Adi Tjahjono bahwa dengan dirangkap oleh guru kerja bendahara menjadi tidak maksimal.

Pengaruh Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis yang diajukan dengan ditolaknya H_0 dan diterimanya H_a . Pada pengujian ini besarnya F_{hitung} sebesar 12,056. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} 2,810 (12,056 > 2,810), derajat signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh partisipasi, transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kota Blitar.

Berdasarkan *model summary* yang didapatkan dari hasil SPSS menunjukkan bahwa koefisien $r^2 = 0,451$ hal ini menunjukkan bahwa 45,10 % efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar kota blitar dipengaruhi oleh partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan 54,90 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti sebagaimana dijelaskan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Kota Blitar, Sdr. M. Toifudin bahwa sebenarnya kondisi bendahara yang ada di sekolah memerlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan perbendaharaan bantuan operasional sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan uji hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar, akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar. Selain itu, disimpulkan juga bahwa secara bersama-sama partisipasi stakeholder, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar di Kota Blitar

REKOMENDASI

Peneliti memberikan rekomendasi sekolah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan meningkatkan kualitas laporan realisasi kegiatan agar tepat waktu dan tidak molor, serta sesuai dengan peruntukannya selain itu tidak melakukan markup harga / anggaran dalam laporan realisasi bantuan operasional sekolah. Selain itu, pengelola dana bantuan operasional sekolah diharapkan selalu meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mengelola sumbangan wali murid bila biaya dari bantuan operasional sekolah tidak mencukupi dengan baik dan melaksanakan survey/angket kepada pihak-pihak terkait tentang rencana dan program yang akan dituangkan dalam RAPBS, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa, mempermudah stakeholder memiliki akses informasi baik orang tua maupun lembaga non pemerintah, serta menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap mengusahakan tidak sering melaksanakan pergeseran anggaran atau rubah rincian, membuat pengumuman pelaksanaan anggaran dimuat dalam laman / web sekolah, serta tidak melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh bos yang dapat dikategorikan korupsi, kolusi dan nepotisme

Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai tim manajemen bantuan operasional sekolah ditingkat kota seharusnya memperhatikan bendahara bantuan operasional sekolah dari sisi kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemenuhan tenaga sehingga tidak dirangkap oleh guru maupun jabatan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada". Vol. 4, No. 1, hlm: 1-11.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.(2009). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.

- Fauzan. (2014). "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah". *Jurnal Modernisasi* , Vol. 10, No. 3, hlm: 158-169.
- Ghozali,I. (2008). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squar*. Semarang : BP Undip.
- Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Hariswati,N. (2015). "Analisa Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS". *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hlm: 75-88.
- Haryanto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: BP Undip.
- Helena, & Therese. (2005). *Stewardship Theory*. Harkes Ingvild.
- Indriantoro & B. Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi*
Jakarta: CV Haji Masagung.
Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Kaen, F. R. (2003). *A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*. USA:Amacom.
- Kaihatu,T. S. (2006). "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , Vol.8, No.1, hlm:1-9.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data*
- Monks, R. A., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance 3rd Edition*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Nomor 80 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta:Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah. (2005). PP Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). PP Nomor 48 Tahun 2008 *tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2015). "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang". *Jurnal Administrasi Publik* , Vol. 3, No. 1, hlm: 61-66.
Sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaw, J. C. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New
- Simamora, B. (2004). *Riset Pemasaran Falsafah, Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT.
- Slamet, P. H. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi,*
- Subagyo, A. W. (2000). *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: UGM.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ke*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Cetakan Ke 16*. Bandung: Alfabeta.

- Tarigan, J. 2008. "User Satisfaction using WebQual Instrument : A Research on Stock Exchange of Thailand (SET)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, hlm: 34-47.
- Trismanto & Z.A. Adiwijaya. (2012). "Tata Kelola Sekolah RSBI serta Dampaknya Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, hlm: 1-14.
- Ulum, I. M. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 *tentang Hak dan Kewajiban Negara*.
- Undang-Undang. (2003). UU Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wahyuni, K. A. (2014). "Efektivitas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Kualitas Layanan Pendidikan SMK dan SMA di Kecamatan Sawan Tahun Ajaran 2013/2014". Vol. 4, No. 1, hlm: 1-11.
- Yahya, A. A. (2013). "Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang)". *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, hlm: 1-22.